**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002**

TENTANG

KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang** : 1. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diatur ketentuan mengenai kode wilayah uji berkala.
2. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bumf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari susunan huruf dan angka yang menyatakan:

- a. kode Daerah Provinsi, terdiri dari 2 (dua) huruf kapital
- b. kode Daerah Kabupaten /Kota, terdiri dari 2 (dua) angka.
- c. kode lokasi tempat pelaksanaan uji berkala, terdiri dari 1 (satu) angka.
- d. nomor urut registrasi kendaraan wajib uji, terdiri dari 6 (enam) angka

Pasal 2

Kode Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, menunjukkan Daerah Propinsi tempat uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 3

Kode Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Huruf AA untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Huruf AB untuk Propinsi Sumatera Utara.
- c. Huruf AC untuk Propinsi Riau
- d. Huruf AD untuk Propinsi Sumatera Barat
- e. Huruf AE untuk Propinsi Jambi
- f. Huruf AF untuk Propinsi Sumatera Selatan
- g. Huruf AG untuk Propinsi Bangka Belitung
- h. Huruf AH untuk Propinsi Bengkulu
- i. Huruf AJ untuk Propinsi Lampung.
- j. Huruf BA untuk Propinsi DKI Jakarta
- k. Huruf BB untuk Propinsi Banten
- l. Huruf BC untuk Propinsi Jawa Barat
- m. Huruf BD untuk Propinsi Jawa Tengah
- n. Huruf BE untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- o. Huruf BF untuk Propinsi Jawa Timur
- p. Huruf CA untuk Propinsi Kalimantan Barat
- q. Huruf CB untuk Propinsi Kalimantan Selatan
- r. Huruf CC untuk Propinsi Kalimantan Tengah
- s. Huruf CD untuk Propinsi Kalimantan Timur
- t. Huruf DA untuk Propinsi Sulawesi Utara
- u. Huruf DB untuk Propinsi Gorontalo
- v. Huruf DC untuk Propinsi Sulawesi Tengah
- w. Huruf DD untuk Propinsi Sulawesi Tenggara
- x. Huruf DE untuk Propinsi Sulawesi Selatan
- y. Huruf EA untuk Propinsi Bali
- z. Huruf EB untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat
- aa. Huruf EC untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur
- bb. Huruf FA untuk Propinsi Maluku
- cc. Huruf FB untuk Propinsi Maluku Utara
- dd. Huruf GA untuk Propinsi Papua.

Pasal 4

Kode Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menunjukkan Daerah Kabupaten/Kota tempat uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan, lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Daerah Propinsi cq. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Kode lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dan nomor urut registrasi kendaraan wajib uji lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 6

Kode wilayah uji kendaraan bermotor ditulis sesuai dengan contoh berikut :

AA-OI-I-OOOOOI

AA : Kode Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
01 : Kode Kota Banda Aceh
1 : lokasi tempat pelaksanaan pengujian kendaraan
000001 : nomor urut registrasi kendaraan wajib uji

Pasal 7

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, maka kode wilayah uji yang telah diberikan kepada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku sampai 31 Desember 2002.

Pasal 8

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan penyesuaian apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 4 Pebruari 2002

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

SUSMONO SOESILO
NIP. 120087571

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur, Walikota, Bupati di seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia.